

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan:
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
3. Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN
TA. 2021
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi
oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse Mappasessu (Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma
Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR
RI)
- Hadir : A. 41 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.
(Menteri Pertanian);
2. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri Kelautan
dan Perikanan); dan
4. Ir. Hartono, M.Sc. (Kelapa Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2021, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

A. KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 per-31 Desember 2021 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp673.691.625.438,00** (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau mencapai **132,94%** dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar **Rp506.746.123.000,00** (lima ratus enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp15.871.684.849.255,00** (lima belas triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau mencapai **97,28%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp16.314.906.396.000,00** (enam belas triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus sembilan enam ribu rupiah).

B. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 per-31 Desember 2021 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp5.879.375.093.734,00** (lima triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau mencapai **121%** dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar **Rp4.848.194.983.000,00** (empat triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp7.416.252.804.826,00** (tujuh triliun empat ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) atau mencapai **87%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp8.572.916.538.000,00** (delapan triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, baik yang berjalan maupun yang tertunggak. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan, penertiban, sampai dengan pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran PNBP.

C. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 per-31 Desember 2021 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 50.b/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp995.737.124.372,00** (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) atau mencapai **86,39%** dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar **Rp1.152.600.484.420,00** (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- b. Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp4.720.482.382.960,00** (empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau mencapai **98,89%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp4.773.318.827,00** (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mengusulkan peningkatan pagu anggaran tahun 2023 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta terkait pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional tahun 2023 agar segera ditindak lanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Menteri Pertanian,

Ttd.

**Prof. Dr. H. Syahrul Yasin
Limpo, S.H., M.Si., M.H.**

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya
Bakar, M.Sc.**

Menteri Kelautan dan
Perikanan,

Ttd.

**Ir. Sakti Wahyu
Trenggono, M.M.**